



**INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018**
INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE



KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



Policy in Practice for Reducing Regional Disparity

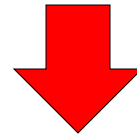
**Deputy Minister of National Development Planning/
Bappenas for Regional Development**

INDONESIA DEVELOPMENT FORUM
July 11, 2018
Jakarta



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional Dalam RPJMN 2015-2019



Pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

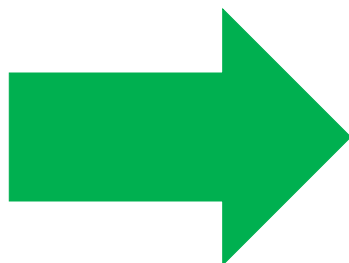
AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN WILAYAH

Akselerasi dan Transformasi
Pembangunan Wilayah



*dilakukan
melalui*

Peningkatan kapasitas SDM;
Peningkatan produktivitas,
efisiensi dan nilai tambah SDA;
Penguatan kapasitas IPTEK;
Penyediaan infrastruktur yang
terpadu dan merata.



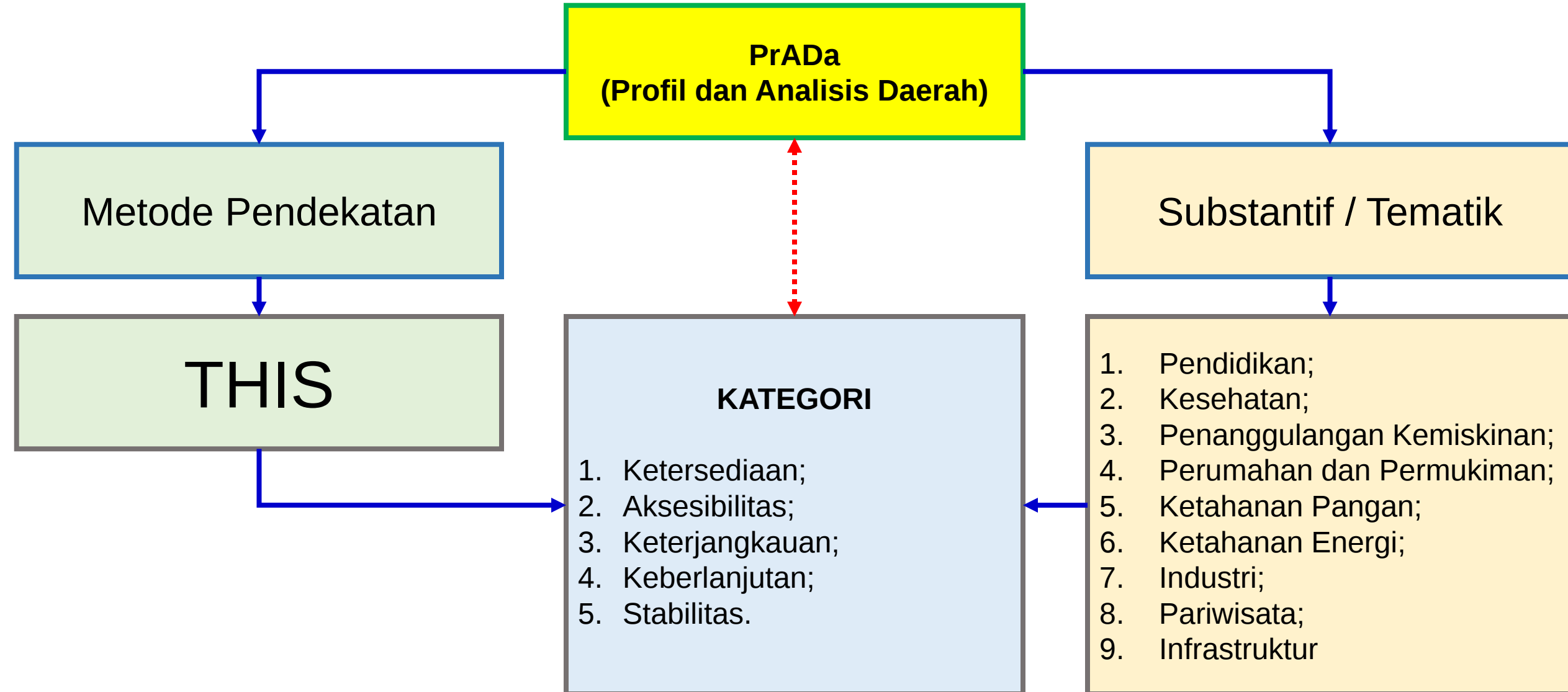
Program/Kegiatan per-Daerah
(Indikatif)



Perlu didukung dengan **data statistik dan spasial** yang akurat dan terbaru, melalui
penyediaan:

PrADa
(Profil dan Analisis Daerah)

METODE PENDEKATAN DAN SUBTANSI PrADa



CONTOH INDIKATOR TEMATIK PENDIDIKAN

Box-1 Contoh Analisis Level KETERSEDIAAN Tematik PENDIDIKAN

Tematik
PENDIDIKAN
(Pendidikan Dasar)

Kategori
KETERSEDIAAN

Komponen
① MURID ② GURU ③ SEKOLAH ④ KURIKULUM

Indikator

- ① **Indikator / Komponen MURID:**
 - Jumlah siswa di sekolah X;
 - Jumlah rombongan belajar di sekolah X;
 - Jumlah rombel yang jumlah siswanya lebih dari 32;
- ② **Indikator / Komponen GURU:**
 - Jumlah guru tetap (PNS/Guru Tetap Yayasan);
 - Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4;
 - Jumlah guru yang sudah bersertifikat;
 - Jumlah guru yang bekerja ≥ 37.5 jam per minggu;
 - Jumlah kepala sekolah yang memiliki kualifikasi S1/D4 dan sudah bersertifikat pendidik;
- ③ **Indikator / Komponen SEKOLAH:**
 - Jumlah ruang kelas, dengan kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat;
 - Jumlah meja/kursi untuk siswa di sekolah X (dalam set dimana 1 set = 1 meja + 1 kursi), dengan kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat;
 - Jumlah ruang kelas di sekolah X yang telah dilengkapi meja dan kursi guru serta papan tulis dalam kondisi baik;
 - Ketersediaan ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan.
- ④ **Indikator / Komponen KURIKULUM:**
 - Jumlah buku paket bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN per kelas;
 - Jumlah alat peraga IPA, seperti (1) model kerangka manusia; (2) model tubuh manusia; (3) bola dunia (globe); (4) contoh peralatan optik; (5) kit IPA eksperimen belajar; dan (6) poster IPA/carta IPA per sekolah;
 - Jumlah judul buku di perpustakaan sekolah;
 - Jumlah guru yang bekerja ≥ 37.5 jam per minggu;

Box-2 Contoh Analisis Level AKSESIBILITAS Tematik PENDIDIKAN

Tematik
PENDIDIKAN
(Pendidikan Dasar)

Kategori
AKSESIBILITAS

Komponen
① JARAK ② WAKTU TEMPUH ③ KONDISI JALAN/JEMBATAN

Indikator

- ① **Indikator / Komponen JARAK:**
 - Rata-rata jarak antara tempat tinggal dengan sekolah terdekat;
- ② **Indikator / Komponen WAKTU TEMPUH:**
 - Rata-rata waktu tempuh ke sekolah terdekat;
- ③ **Indikator / Komponen KONDISI JALAN/JEMBATAN:**
 - Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap.

CONTOH INDIKATOR TEMATIK PENDIDIKAN

Box-3

Contoh Analisis Level KETERJANGKAUAN Tematik PENDIDIKAN



Komponen
BIAYA PENDIDIKAN



Indikator

- ① **Indikator / Komponen BIAYA PENDIDIKAN:**
- Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk pendidikan.

Box-4

Contoh Analisis Level KEBERLANJUTAN Tematik PENDIDIKAN



Komponen

① APBD UNTUK PENDIDIKAN ② PARTISIPASI UNTUK BERSEKOLAH



Indikator

- ① **Indikator / Komponen APBD UNTUK PENDIDIKAN:**
- Proporsi anggaran di dalam APBD untuk pendidikan;
- ② **Indikator / Komponen PARTISIPASI UNTUK BERSEKOLAH:**
- Angka Partisipasi Murni;
 - Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
 - Harapan Lama Sekolah (HLS).

CONTOH INDIKATOR TEMATIK PENDIDIKAN

Box-5

Contoh Analisis Level STABILITAS Tematik PENDIDIKAN

Tematik
PENDIDIKAN
(Pendidikan Dasar)



Kategori
STABILITAS



Komponen

① INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI); ② MITIGASI BENCANA



Indikator

① **Indikator / Komponen INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI):**

- Indeks resiko bencana kabupaten/kota.

② **Indikator / Komponen MITIGASI BENCANA:**

- Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan;
- Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan;
- Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan.

CONTOH HASIL ANALISIS TEMATIK PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KATEGORI “(1) KETERSEDIAAN”

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF TINGGI HINGGA SEDANG RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 9 KABUPATEN/KOTA
02.	Kota Padang			
03.	Kota Pariaman	Sedang	Prioritas 2	
04.	Agam			
05.	Pasaman Barat			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Sijunjung			
08.	Dharmasraya			
09.	Solok Selatan			
10.	Kota Bukittinggi			
11.	Pasaman	Tinggi	Prioritas 3	
12.	Padang Pariaman			
13.	Solok			
14.	Lima Puluh Kota			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
TEMATIK PENDIDIKAN				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Masih terbatasnya jumlah ruang kelas di beberapa kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk seluruh rombongan belajar; - Tingkat kerusakan ruang kelas relatif tinggi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; - Rasio siswa/guru relatif masih belum mencukupi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di beberapa kabupaten/kota; - Kualifikasi guru minimal sarjana relatif sudah mencukupi, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): - Program: - Pendidikan dasar dan menengah; - Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. - Kegiatan: - Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); - Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); - Rehabilitasi ruang belajar; - Renovasi sekolah; - Perekrutan guru PNS; - Pemberian beasiswa bagi guru; - Sertifikasi guru; - Peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. - Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kemen PAN RB; - Pemerintah Daerah. KETERSEDIAAN
02.	Pesisir Selatan			
03.	Kota Padang	Sedang	Prioritas 2	
04.	Pasaman Barat			
05.	Pasaman			
06.	Dharmasraya			
07.	Solok Selatan			
08.	Lima Puluh Kota			
09.	Kota Bukittinggi			
10.	Kota Payakumbuh			
11.	Kota Solok			
12.	Kota Pariaman	Tinggi	Prioritas 3	
13.	Agam			
14.	Padang Pariaman			
15.	Sijunjung			
16.	Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

KETERSEDIAAN

CONTOH HASIL ANALISIS TEMATIK PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KATEGORI “ (2) AKSESIBILITAS DAN (3) KETERJANGKAUAN”

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: - Jarak dari desa ke sekolah, di beberapa kabupaten/kota masih relatif jauh. - Minimnya kondisi jalan desa yang beraspal. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: - Pendidikan dasar dan menengah; - Pembangunan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. Kegiatan: - Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di setiap desa/kelurahan; - Pembangunan dan perbaikan jalan desa; Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.
02.	Pasaman Barat			
03.	Sijunjung			
04.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
05.	Solok Selatan			
06.	Lima Puluh Kota			
07.	Kota Padang	Tinggi	Prioritas 3	
08.	Kota Pariaman			
09.	Agam			
10.	Pesisir Selatan			
11.	Pasaman			
12.	Padang Pariaman			
13.	Solok			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
AKSESIBILITAS				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				
Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)				

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan
01.	Kota Padang	Rendah	Prioritas 1	❶ Permasalahan Utama: • Rata-rata biaya pendidikan relatif dapat terjangkau di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, walaupun demikian di beberapa kabupaten/kota biaya pendidikan masih relatif tinggi. ❷ Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): • Program: - Pendidikan dasar dan menengah; • Kegiatan: - Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); - Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). • Pelaksana: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Pemerintah Daerah.
02.	Kota Bukittinggi			
03.	Kota Padang Panjang			
04.	Kepulauan Mentawai	Sedang	Prioritas 2	
05.	Kota Pariaman			
06.	Kota Payakumbuh			
07.	Kota Solok	Tinggi	Prioritas 3	
08.	Agam			
09.	Pasaman Barat			
10.	Pesisir Selatan			
11.	Pasaman			
12.	Padang Pariaman			
13.	Sijunjung			
14.	Dharmasraya			
15.	Solok Selatan			
16.	Solok			
17.	Lima Puluh Kota			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			

Legenda:
Rendah
Sedang
Tinggi

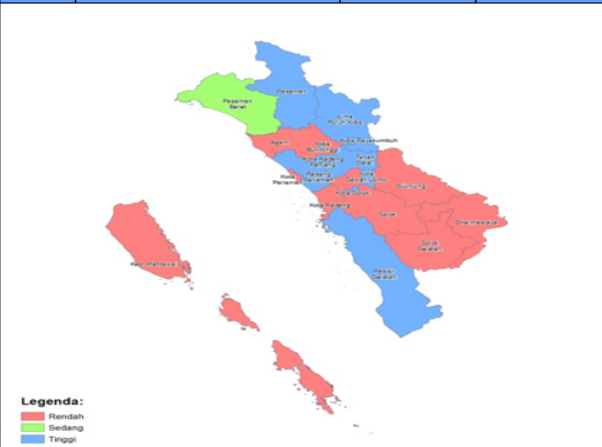
KETERJANGKAUAN

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

CONTOH HASIL ANALISIS TEMATIK PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KATEGORI “KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS”

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: Masih tingginya jumlah siswa usia sekolah yang harusnya bersekolah di beberapa kabupaten/kota, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan: Peningkatan proporsi anggaran pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan layanan pendidikan. Pelaksana: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah.
02.	Kota Padang			
03.	Kota Pariaman			
04.	Agam			
05.	Sijunjung			
06.	Dharmasraya			
07.	Solok Selatan			
08.	Solok			
09.	Pasaman Barat	Sedang	Prioritas 2	
10.	Pesisir Selatan	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Pasaman			
12.	Padang Pariaman			
13.	Lima Puluh Kota			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
				
Legenda: Rendah Sedang Tinggi				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				

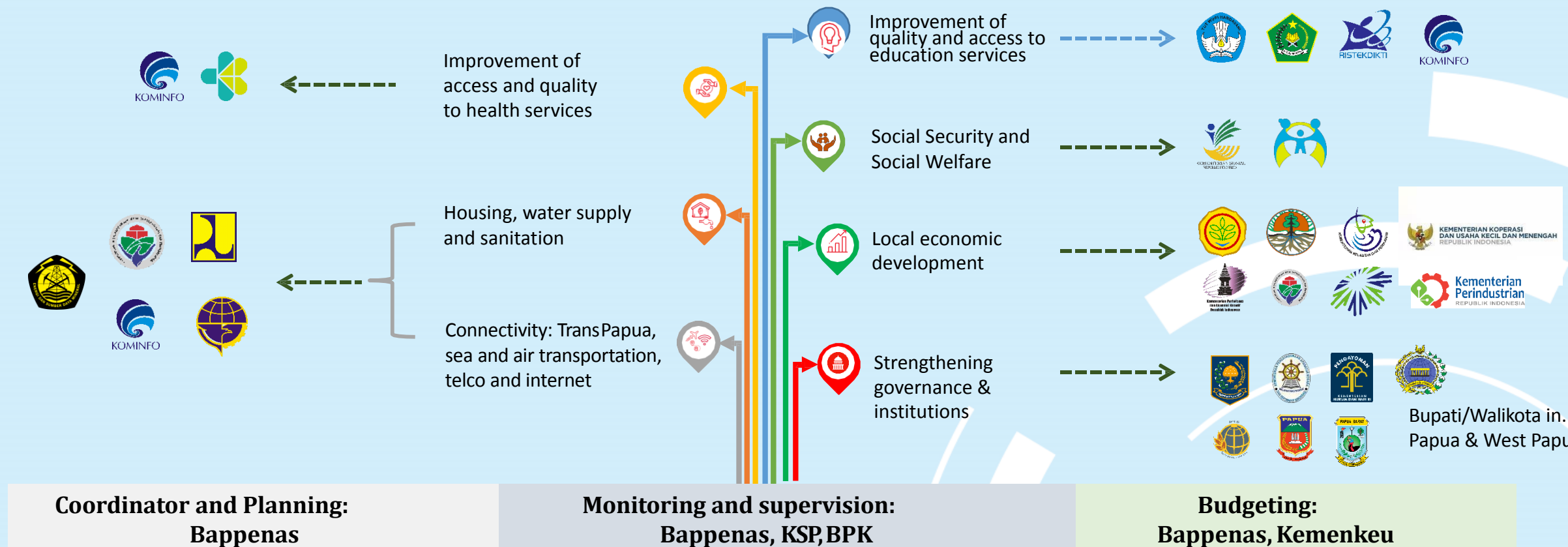
KEBERLANJUTAN

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan	
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	1 Permasalahan Utama: Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Mitigasi bencana. Kegiatan: Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; Pemasangan sistem peringatan dini; Pembentukan desa tangguh bencana; Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Pemerintah Daerah.	
02.	Kota Padang				
03.	Kota Pariaman				
04.	Agam				
05.	Pasaman Barat				
06.	Pesisir Selatan				
07.	Pasaman				
08.	Padang Pariaman				
09.	Sijunjung	Sedang	Prioritas 2		
10.	Dharmasraya				
11.	Solok Selatan				
12.	Solok				
13.	Lima Puluh Kota				
14.	Kota Bukittinggi				
15.	Kota Payakumbuh				
16.	Kota Solok				
17.	Kota Padang Panjang				
18.	Tanah Datar				
19.	Kota Sawah Lunto				
 Legenda: Rendah Sedang Tinggi					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				STABILITAS Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	



DEVELOPMENT ACCELERATION OF PAPUA AND WEST PAPUA PROVINCES



Coordinator and Planning:
Bappenas

Monitoring and supervision:
Bappenas, KSP, BPK

Budgeting:
Bappenas, Kemenkeu

INPRES 6/2017 :
Acceleration of Welfare Development for Papua and West Papua Provinces



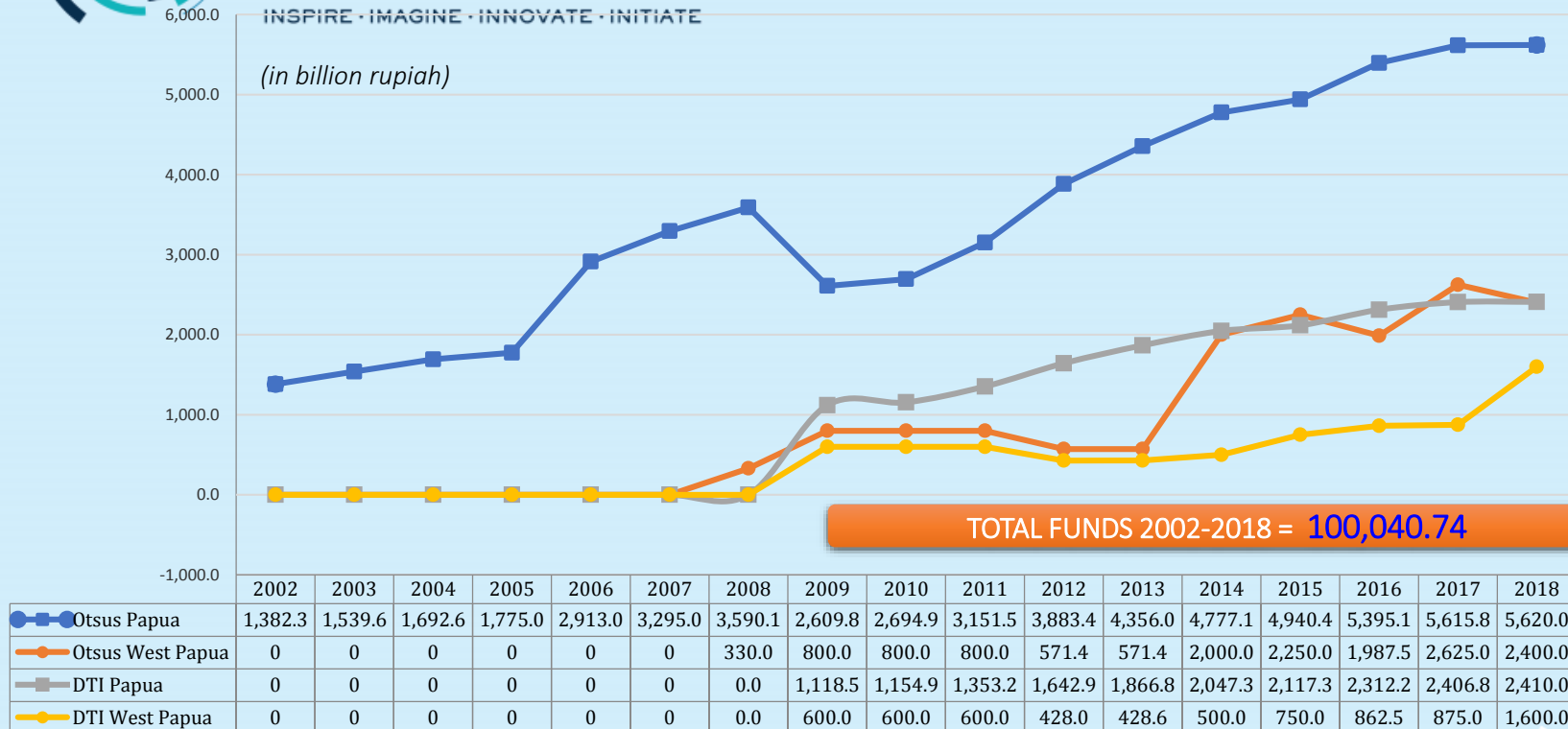
INDONESIA DEVELOPMENT FORUM 2018

INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE

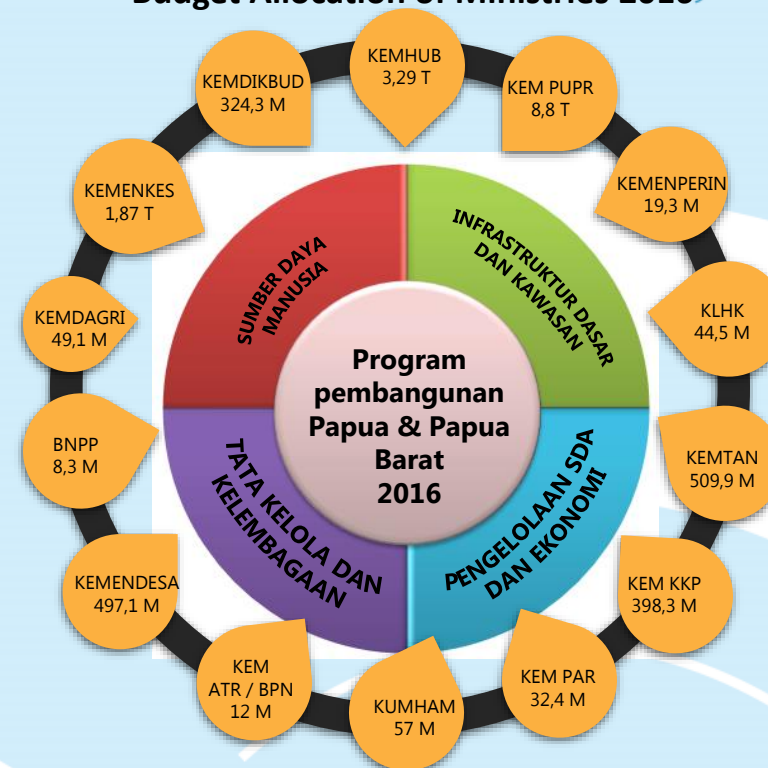
PAPUA AND WEST PAPUA PROGRESS OF SPECIFIC AUTONOMY FUNDS & ADDITIONAL ALLOCATION FUNDS FOR INFRASTRUCTURE IN 2002-2018



(in billion rupiah)



Budget Allocation of Ministries 2016



Transfer funds in order Special Autonomy (Law No 21 Of 2014), consists of:

- ❑ **Special Autonomy Fund (Dana Otsus).** The amount equivalent to 2% of General Allocation Fund (DAU) for 20 years, prioritized for health and education services 30% and 15% respectively (*Article 34 paragraph 3 point e*)
- ❑ **Additional Allocation Fund for Infrastructure** determined between government and parliament based on the Provincial proposals in each budget year. Prioritized for development of transportation infrastructure (*Article 34 paragraph 3 point f*)
- ❑ **Oil and Gas Revenue Sharing Fund.** The amount equivalent to 70% in the year 1 to 25, and become 50% afterwards

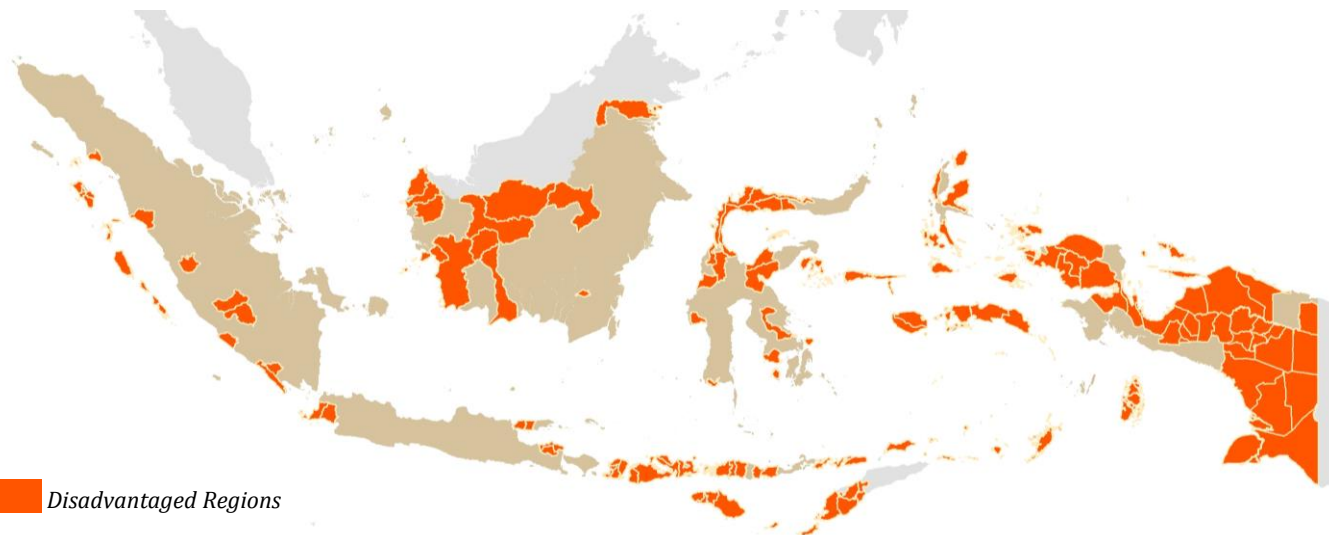
Challenges: How to improve the quality of spending by improving the capacity of local governments and local communities?



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018
INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE

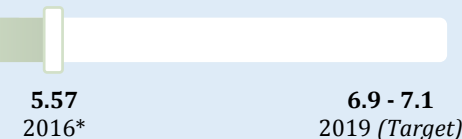
DISADVANTAGED REGIONS DEVELOPMENT PROGRESS

Distribution of Disadvantaged Regions

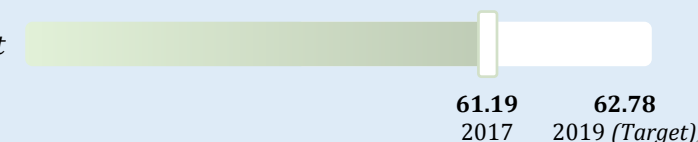


Main Goals

Growth



Human
Development
Index



Poverty
Rate



Programs/Activities



Local Economic
Development



Improvement of
Telecommunication Services



Housing



Improvement Of Quality And
Access To Health Services



Water Supply and
Sanitation



Improvement of
Electrification



Connectivity
Improvement



Improvement of quality and
access to education services

Challenges: How to synchronize policies and project of the line ministries and local governments, and strengthening collaboration with private and othe stakeholders?



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018
INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE

DEVELOPMENT OF 7 NATIONAL CROSS-BORDER POST (PLBN)

Main Role :
Ministry of
Public
Works and
Housing



1. Core Zone

Cross-Border Building

Center for Growth of Border Area

2. Sub-Core Zone

- Employees Housing
- Environment and Infrastructure

3. Support Zone

- Rest Area
- Market
- Public Area



Need supports
from line
Ministries

2015

Ground Breaking

2016

Development of Cross-Border
Core Zone

2017

Development of Sub-Core
Zone and Support Zone

2018



PLBN Aruk, Sambas Regency,
West Kalimantan Province



PLBN Entikong, Sanggau Regency,
West Kalimantan Province



PLBN Motamasin, Malaka Regency,
East Nusa-Tenggara Province



PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu Regency,
West Kalimantan Province



PLBN Wini, North Timor Tengah Regency,
East Nusa-Tenggara Province



PLBN in Skouw, Jayapura City,
Papua Province

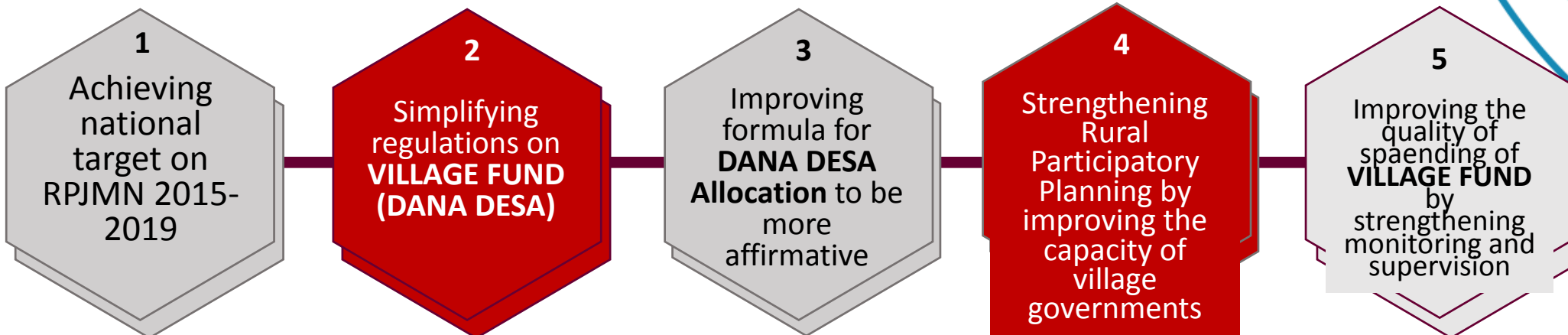
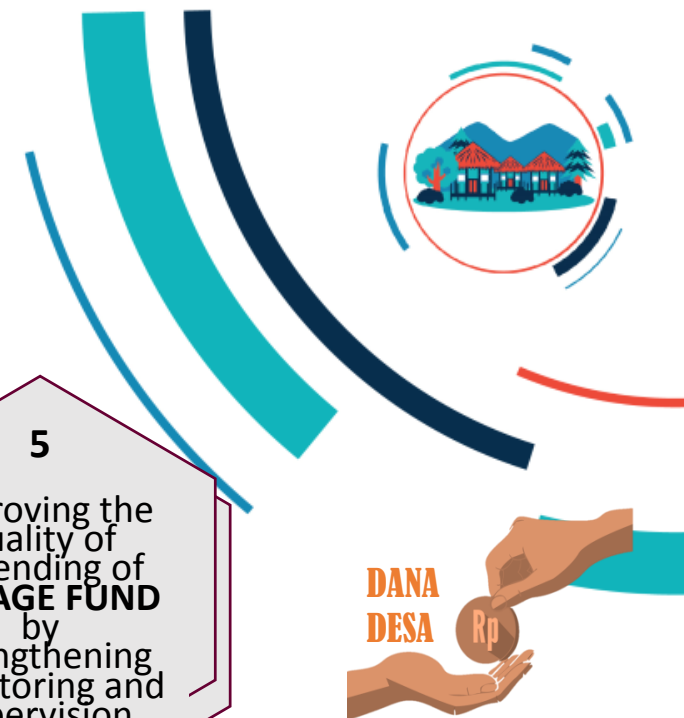


PLBN in Motaain, Belu Regency,
East Nusa-Tenggara Province

Challenges: How to develop the boarder-areas as a growth center for accelerating social, cultural and economic actities



POLICY DIRECTIONS AND STRATEGIES FOR VILLAGE FUNDS



Priority:

Goals



Increasing productivity, creating more jobs, generating more incomes and accelerating rural social economic development



Reducing poverty rate and stunting rate



Reducing rural-urban disparity



Strengthening social capital and social resilience

Strategy:

a. **Community empowerment and poverty reduction**

b. Reducing gap on access to health, education and other rural public services

c. Adopting affirmation actions for the less-developed villages, the border areas and the small islands.

a. Building infrastructure for improving public services

b. Developing rural economic activities

c. Empowering rural poor communities

d. Strengthening rural social capital

e. Improving the capacity of kecamatan, village governments and rural communities



INDONESIA DEVELOPMENT FORUM 2018

INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE

NSLIC/NSELRED
a cooperation program between Government of Indonesia with
Government of Canada in 2017-2022



GOALS

To develop local economic, increase productivity, create more jobs and generate more income for the poor women and men by improving investment climate and facilitating business development

2016	Project preparation
2017	Assessment on local investment climate and leading commodities Setting up the Responsive Innovation Fund (RIF) and selection of 6 KPPN for piloting
2018	Strengthening One Stop Integrated Service Institution (PTSP) in the regions
2019	Stakeholders forum for local economic development Preparation of LED study with regional-based approach
2020	Implementation of RIF (Responsive Innovation Fund) on selected KPPN (National Center Growth of Rural Economic Development)
2021	Improving access to capital and market for SME's and cooperative
2022	Dissemination of the best practices on LED Build LRED center of knowledge Formulation of exit strategy

SCOPE OF INTERVENTIONS:





INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018
INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE



THANK YOU

